

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Intisari.....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	15
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	15
2. Asas-asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah	16
3. Urusan Pemerintahan.....	18

B.	Tinjauan Umum Tentang Teori Peraturan Perundang-Undangan.	21
1.	Pengertian Peraturan perundang-undangan .....	21
2.	Jenis, dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	22
C.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Bernuansa Agama ...	23
1.	Agama di Indonesia .....	23
2.	Peraturan Daerah .....	24
3.	Pembentukan Peraturan Daerah .....	26
4.	Peraturan Daerah Bernuansa Agama .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
A.	Jenis dan Sifat penelitian.....	31
B.	Data Penelitian .....	32
C.	Cara dan Alat Pengumpulan Data .....	34
D.	Analisis Data .....	35
E.	Jalannya Penelitian.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>37</b>
A.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata .....	37
1.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai	

Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya .....	37
Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 .....	43
2. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata .....	46
Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 .....	50
3. Persamaan dan Perbedaan Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 .....	53
B. Reaksi Masyarakat Dan Kementerian Dalam Negeri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Kota Tasikmalaya (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014) Dan Reaksi Masyarakat Dan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Kabupaten Bekasi (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016).....	55
1. Reaksi Masyarakat Dan Kementerian Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya .....	55

Reaksi Masyarakat: Kesepakatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 .....	55
Reaksi Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014.. .....	59
2. Reaksi Masyarakat dan Putusan Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. ....	61
Reaksi Masyarakat: Perbedaan Pendapat antara Mayoritas Muslim dan Pengusaha Tempat hiburan malam .....	61
Putusan Mahkamah Agung terhadap Gugatan Pengusaha Tempat Hiburan Malam .....	62
3. Persamaan dan Perbedaan Reaksi Masyarakat dan Reaksi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016.....	67
C. Eksistensi Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Kota Tasikmalaya (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014) Dan Di Kabupaten Bekasi (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016) Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.....	68
1. Pengertian dan Jenis Peraturan Bernuansa Agama.....	68

2.	Perspektif Historis Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia.....	71
3.	Perspektif Filosofis Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia.....	74
4.	Perspektif Peraturan Daerah Bernuansa Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. ....	77
1)	Undang-Undang Dasar 1945.....	79
2)	Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ....	83
5.	Eksistensi Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Kota Tasikmalaya (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014) Dan Di Kabupaten Bekasi (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016) Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>96</b>